

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perekonomian yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan inflasi. Hal tersebut merupakan dilema bagi negara yang sedang berkembang. Salah satu masalah yang belum terselesaikan di Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dialami semua negara. Kemiskinan bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan sosial. Ia merupakan fenomena sosial yang selalu menjadi atribut negara-negara dunia ketiga. Fenomena ini juga merupakan kebalikan dari kondisi yang dialami oleh negara-negara maju yang memiliki atribut sebagai negara modren. Jika diamati, seolah-olah kemiskinan identik dan selalu melekat di dalam struktur negara-negara dunia ketiga dan menjadi problem yang cukup serius untuk mendapatkan penanganan dari para penyelenggara negara.

Masalah kemiskinan sendiri memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya materi. Dari ukuran kehidupan modren pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modren. Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu bersamaan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini. Kemiskinan seolah sudah menjadi tren kehidupan bangsa. Masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dapat dengan mudah diidentifikasi dari waktu ke waktu. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang disuarakan pemerintah dengan angka statistik masih memicu pro dan kontra.

Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju kemiskinan. Efektivitas dalam menurunkan kemiskinan merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan dan pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan.

Fenomena kemiskinan muncul, ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, dan alokasi lingkungan.

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dan masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (<http://p3b.bappenas.go.id>)

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melakukan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilakukan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

Menurut Bappenas yang telah ditulis dalam buku Anang Solihin Wardan yang berjudul “Peduli Kemiskinan” (2009), kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang, laki – laki, perempuan yang tidak terpenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Atas definisi itu masyarakat miskin mempunyai hak – hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan data lain **BPS Kabupaten Pesisir selatan** perkembangan penanggulangan kemiskinan memperhatikan keadaan yang berfluktuasi. Hal ini dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin kabupaten pesisir selatan pada tahun 2010 sebesar 10,22 %, namun di tahun 2011 hingga 2015 persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 9,75 % hingga 6,46 % , mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,92% dan juga mengalami penurunan di tahun 2017 hingga 2018 sebesar 7,79 % hingga 7,5 9% , namun juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 7,88 % dan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 7,61 %.

Berikut adalah Persentase Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2020.

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin
Di Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2020

Tahun	Kemiskinan (Persentase)
2010	10,22
2011	9,75
2012	8,68
2013	8,64
2014	7,82
2015	6,46
2016	7,92
2017	7,79
2018	7,59
2019	7,88
2020	7,61

Sumber :BPS 2010-2020

Berdasarkan data dari tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami naik turun, artinya angka penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi. Persentase Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan paling tinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 10,22 persen. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan paling rendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,46 persen.

United Nations development programe (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara di lihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (lifeexpectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate), rata-rata lama sekolah(mean year of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing powerparity). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan

kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkat. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produk simampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Namun kenyataan yang terjadi pada Kabupaten Pesisir Selatan, Indeks Pembangunan Manusia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan dan fluktuasi.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat, United Nation Development Programme (UNDP), telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia. Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu 1). Angka Harapan Hidup, 2). Angka Melek Huruf, 3). Rata rata lama Sekolah dan 4). kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan), sedangkan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan (dimensi pendidikan). Adapun indikator kemampuan daya beli (pendapatan) digunakan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak (UNDP, 2004).

Berikut adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2020.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2010-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2010	65,09
2011	65,80
2012	66,49
2013	67,31
2014	67,75
2015	68,07
2016	68,39
2017	68,74
2018	69,40
2019	70,08
2020	69,90

Sumber :BPS 2010-2020

Berdasarkan data dari tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi setiap tahunnya, artinya Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Pesisir Selatan naik turun. Indeks Pembangunan Manusia paling tinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 70,08 indeks. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah pada tahun 2010 sebesar 65,09 indeks.

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan

penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Selain pertumbuhan proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan sendirinya perubahan mendasar pada struktur ekonomi. Dari sisi permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan pendapatan. Ditandai dengan terjadinya perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Dari penawaran agregat, faktor-faktor pendorong utama adalah perubahan kemajuan teknologi, peningkatan kualitas SDM dan penemuan material baru untuk produksi yang merupakan sumber penting pertumbuhan (Tambunan, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai apakah perekonomian di suatu wilayah atau daerah tersebut berkembang atau tidak, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara (Mustika, 2010). Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara jika terus meningkat pada waktu-kewaktu, ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami peningkatan, sebaliknya apabila perekonomian tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan, itu menunjukkan bahwa perekonomian suatu wilayah tersebut tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami kemajuan yang baik. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah bagi suatu negara dan akan memperburuk perekonomian di negara tersebut, hal terburuk yang akan timbul dalam masalah perekonomian tersebut diantaranya adalah masalah pengangguran.

Berikut disajikan data Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2020.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Di Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2020

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	5.894.434,17	-
2011	6.234.822,38	5,77
2012	6.597.446,10	5,82
2013	6.986.968,48	5,90
2014	7.392.536,44	5,80
2015	7.816.214,05	5,73
2016	8.232.592,61	5,33
2017	8.678.053,24	5,42
2018	9.139.972,32	5,36
2019	9.576.666,52	4,81
2020	9.470.783,59	-1,11

Sumber : BPS 2010-2020

Berdasarkan data dari tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yaitu dengan pertumbuhan turun sebesar -1,11 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan paling tinggi adalah pada tahun 2013 dengan Pertumbuhan sebesar 5,90 persen.

Nugraha (2017), salah satu masalah pokok yang dihadapi negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah masalah pengangguran. Menurut Sukirno (2016) pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, kemudian ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya.

Nurcholis (2014) menemukan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan setiap tahunnya dan hal ini diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan indeks

pembangunan manusia, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Muminin dan Wahyu (2017) penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Berikut adalah Persentase Pengangguran Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2020.

Tabel 1.4
Persentase Tingkat Pengangguran
Di Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2020

Tahun	Pengangguran (%)
2010	8,09
2011	10,07
2012	8,09
2013	11,03
2014	9,58
2015	11,69
2016	8,82
2017	5,95
2018	5,85
2019	6,02
2020	7,00

Sumber : BPS 2010-2020

Berdasarkan data dari tabel 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, artinya persentase tingkat Pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan naik turun disetiap tahunnya. Persentase tingkat pengangguran tertinggi di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi pada tahun 2015 sebesar 11,69 persen. Sedangkan persentase tingkat

pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan terendah adalah pada tahun 2018 sebesar 5,85 persen.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu dimana variabel dependen yang digunakan adalah Kemiskinan dan variabel independen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu objek yang diteliti adalah Kemiskinan di kabupaten Pesisir Selatan periode 1999 - 2021. Meskipun pada penelitian ini sudah banyak yang meneliti dan terdapat perbedaan hasil penelitian pada sebelumnya hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia(IPM) terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pengangguran terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan.
2. Pengaruh indeks pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan.
3. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan.
4. Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pengangguran terhadap kemiskinan di Kab. Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten pesisir selatan dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
2. Bagi pemerintah sebagai masukan dan pengambilan kebijakan guna mengatasi kemiskinan di Kab.Pesisir Selatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang memiliki hubungan serupa.